

Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Muhammad Iqbal Ansyari¹, Ichsan Iqbal²

^{1,2}IAIN Pontianak

Email: iqbalansyari18@gmail.com¹, ichsaniqbal@iainptk.ac.id²

Abstrak

Ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif memiliki pendekatan tersendiri dalam perumusan kebijakan makroekonomi. Dalam perspektif ini, pemerintah bukan hanya sebagai pengatur pasar, tetapi juga sebagai pelaksana amanah ilahiyah dalam menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis peran dan fungsi pemerintah dalam ekonomi makro Islam, meliputi stabilisasi, alokasi, distribusi, dan regulasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis literatur dari sumber-sumber klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam ekonomi Islam diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta mencapai falah (kesejahteraan dunia-akhirat).

Kata Kunci: Ekonomi Makro Islam, Pemerintah, Keadilan, Distribusi, Kebijakan Fiskal Syariah.

Abstract

Islamic economics as an alternative economic system has its own approach in formulating macroeconomic policies. In this perspective, the government is not only a market regulator, but also an implementer of the divine mandate in creating economic justice and social welfare. This paper aims to theoretically examine the role and function of government in Islamic macroeconomics, including stabilization, allocation, distribution and regulation based on sharia principles. This study uses a qualitative-descriptive approach with literature analysis from classical and contemporary sources. The research results show that government intervention in the Islamic economy is directed at realizing a balance between individual and community interests and achieving falah (prosperity in the world and the hereafter).

Keywords: Islamic Macroeconomics, Government, Justice, Distribution, Sharia Fiscal Policy.

PENDAHULUAN

Ekonomi makro merupakan studi mengenai perilaku ekonomi secara keseluruhan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah. Dalam sistem ekonomi konvensional, fungsi pemerintah terbatas pada stabilisasi dan koreksi

kegagalan pasar. Berbeda dengan itu, ekonomi Islam menetapkan peran aktif pemerintah sebagai penjaga maqashid syariah (tujuan hukum Islam), termasuk dalam bidang ekonomi.

Makalah ini akan membahas bagaimana pemerintah dalam sistem ekonomi Islam menjalankan fungsi-fungsi

makroekonomi, serta meninjau kebijakan fiskal dan moneter dalam kerangka syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi Makro Islam

Ekonomi makro Islam adalah bagian dari ekonomi Islam yang mempelajari bagaimana sistem ekonomi berjalan pada level agregat dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, larangan riba, gharar, dan penekanan pada distribusi kekayaan.

Tujuan Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Menurut para ulama seperti Al-Ghazali dan Ibn Khaldun, fungsi pemerintahan dalam ekonomi adalah menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan (mafsadah), termasuk dalam urusan ekonomi Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan, dengan analisis isi terhadap literatur klasik dan kontemporer mengenai ekonomi Islam, untuk menjelaskan peran dan fungsi pemerintah dalam ekonomi makro Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Makroekonomi Pemerintah dalam Islam

1. Fungsi Alokasi Pemerintah Islam bertanggung jawab atas penyediaan barang publik dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negara juga berwenang dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kemaslahatan umat.
2. Fungsi Distribusi Distribusi kekayaan dalam Islam dilakukan melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang diatur dan diawasi oleh pemerintah. Pemerintah juga bertugas mengurangi kesenjangan sosial melalui kebijakan redistribusi.
3. Fungsi Stabilisasi Pemerintah berperan menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan tingkat inflasi. Dalam sistem Islam, stabilisasi dilakukan tanpa menggunakan instrumen riba, melainkan dengan pengelolaan sektor riil dan optimalisasi baitul mal.
4. Fungsi Regulasi dan Pengawasan Negara memiliki wewenang untuk mengatur pasar agar tidak terjadi monopoli, penimbunan, penipuan (tadlis), serta memantau sistem transaksi agar sesuai dengan prinsip halal dan thayyib.

B. Instrumen Makroekonomi dalam Islam

1. Kebijakan Fiskal Syariah Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam menggunakan instrumen seperti zakat, kharaj, jizyah, dan ghanimah sebagai sumber pemasukan negara. Pengeluaran diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat.
2. Kebijakan Moneter Tanpa Riba Sistem moneter Islam menolak penggunaan bunga sebagai alat pengendalian moneter. Sebagai gantinya, digunakan instrumen berbasis akad syariah seperti mudarabah dan murabahah, serta dukungan terhadap sektor riil.
3. Peran Baitul Mal Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga keuangan negara yang menampung dan mendistribusikan dana umat sesuai dengan prinsip keadilan. Pemerintah bertugas memastikan baitul mal berfungsi optimal sebagai penggerak ekonomi.

C. Studi Kasus Sejarah: Umar Bin Abdul Aziz

Pada masa kekuasaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, fungsi ekonomi makro dilaksanakan secara efektif. Distribusi zakat berjalan sangat baik hingga hampir tidak

ditemukan penerima zakat. Ini menunjukkan bagaimana intervensi pemerintah yang tepat dapat menciptakan kesejahteraan dalam kerangka ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Pemerintah dalam ekonomi Islam memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan ekonomi makro melalui kebijakan yang berbasis syariah. Fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dijalankan dengan prinsip keadilan dan keberkahan. Pemerintah bukan sekadar regulator pasar, tetapi juga sebagai pengayom ekonomi umat. Penerapan sistem ini memerlukan integritas, pengawasan kuat, dan kesadaran akan nilai-nilai Islam dalam pengambilan kebijakan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation, 1992.
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Role of the State in Islamic Economic System*. Islamic Research and Training Institute, 1996.
- Kahf, Monzer. *Public Finance in Islam*. Islamic Research and Training Institute, 1989.
- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Makro Islami*. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Dar Al-Fikr.